

Pengembangan Collaborative Governance dalam Rangka Pemulihan Pemerintah Sektor Pariwisata dan UMKM

Lisnawati¹, Muhamad Husein Maruapey^{2*}

¹² Universitas Djuanda Bogor

¹² Jagorawi Toll Rd No.1, Ciawi, Bogor Regency, West Java 16720

email: lisnawati081198@gmail.com¹; maruapey.husein@gmail.com²;

Abstract

Tourism can provide economic growth in terms of opening job opportunities, income, standard of living, and can activate the economic sector of a region. The existence of management by means of improving facilities such as facilities and infrastructure, professional human resources can create an attraction for tourism activities, and is a very promising field to support the economic development of a region. In terms of UMKM products, it directly involves the role of the public and the private sector which have their respective roles in introducing and marketing UMKM products. The purpose of this study is to identify the synergy between the government and State-Owned Enterprises (BUMN) in implementing strategic plans for tourism development. And to find out collaborative governance carried out by the Government and stakeholders in promoting a product. The implementation of this activity carries collaborative governance by involving all parties in the recovery of the tourism sector and MSMEs. This research on the recovery of the tourism sector and MSMEs uses a descriptive type with a qualitative approach. The focus of this research is using the collaborative governance process from More and Stephens (2012) which consists of assessment, initiative, delebration, implementation. The results showed that the government has goodwill in the recovery of the government in the tourism sector and MSMEs. This is evidenced by the government's response to collaborating with various parties, so that the facilities and infrastructure needed for the recovery of the government in the tourism sector and MSMEs are able to contribute and support the economy.

Keywords: Collaborative Governance; Tourism; MSME

Abstrak

Pariwisata dapat menyediakan pertumbuhan ekonomi dalam hal membuka peluang kerja, pendapatan, taraf hidup, dan bisa mengaktifkan sektor perekonomian suatu daerah. Adanya pengelolaan dengan cara peningkatan fasilitas seperti sarana dan prasarana, SDM yang profesional dapat menciptakan daya tarik untuk kegiatan pariwisata, dan merupakan bidang yang sangat menjanjikan untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam hal produk UMKM melibatkan secara langsung peranan masyarakat dan swasta yang memiliki peran masing-masing dalam mengenalkan serta memasarkan produk UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi sinergisitas pemerintah dan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelaksanaan rencana strategis pengembangan pariwisata. Dan untuk mengetahui *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah serta stakeholder dalam mempromosikan suatu produk. Pelaksanaan kegiatan ini mengusung *Collaborative Governance* dengan terlibatnya semua pihak dalam pemulihan sektor pariwisata dan UMKM. Penelitian pemulihan sektor pariwisata dan UMKM ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan proses collaborative governance dari More and Stephens (2012) yang terdiri dari assasment, ininitiation, delebration, implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki *goodwill* dalam pemulihan pemerintah sektor pariwisata dan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan respon pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemulihan pemerintah sektor pariwisata dan UMKM ini mampu berkontribusi dan menunjang perekonomian.

Keywords: Collaborative Governance; Pariwisata; UMKM;

*)Penulis Korespondensi

E-mail : maruapey.husein@gmail.com

Pembahasan

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dan tercepat di dunia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pariwisata mampu menjadi pemasukan bagi negara, khususnya bagi pemerintahan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata sebagai instrumen kunci pada pertumbuhan global serta pengembangan dan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata merupakan potensi yang dimiliki setiap

daerah, baik yang berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap daerah memiliki potensi wisata yang dapat digali, diolah, dikelola serta dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hiburan dan sarana rekreasi. Pariwisata yang dikelola dengan baik juga dapat dijadikan sebagai pendapatan bagi daerah. Dari sektor pariwisata juga dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan yang berkunjung.

Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi disekitar area wisata dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. "Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menunjukkan dampak positif dalam pembangunan perekonomian suatu daerah" (Kemal, 2002).

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Selain itu UMKM juga dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam penyelenggaraan negara telah menunjukkan keseriusannya dalam upaya pemberdayaan UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan disahkannya Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Undang-undang tersebut. Rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana proses Collaborative Governance yang dilakukan Pemerintah dalam pemulihan sektor pariwisata dan UMKM? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pelaksanaan Collaborative Governance yang dilakukan Pemerintah dalam pemulihan sektor pariwisata dan UMKM.

Metode

Pada penelitian tentang pengembangan collaborative governance pada pemulihan sektor pariwisata dan UMKM. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan proses collaborative governance menurut More and Stephens (2012) dengan menggunakan empat indikator di dalamnya, yaitu: 1). *Assasment* (Penilaian), 2). *Innitiation* (Inisiasi), 3). *Delebration* (Musyawarah), 4). *Implementation* (Penerapan). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2015), yaitu: "pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pemaparan dan penarikan kesimpulan".

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi maupun metode dan substitusinya.

Collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ansell C dan Gash A (2007), menyatakan "Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya", (Davies Althea L Rehema M. White, 2012) "Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi". Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan "berbagi kekuatan". (Taylo Brent and Rob C. de Loe, 2012).

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi atau arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Sektor Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata, termasuk pengusaha obyek serta usaha-usaha yang terkait dibidang pariwisata. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian mengenai pengembangan Collaborative Governance dalam Pemulihan Sektor pariwisata dan UMKM, pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Perum Perhutani, Pemerintah guna mengetahui proses collaborasi yang telah dilakukan, maka penelitian menggunakan indikator yang di ungkapkan oleh more and stephens (2012) dengan empat indikator di dalamnya sebagai berikut:

Assasment (Penilaian)

Penilaian dilakukan oleh para Stakeholders melihat potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan memulihkan lebih jauh lagi, pesona alam maupun buatan yang dapat menarik wisatawan jauh lebih baik kedepannya. Adanya perselisihan diantara pemerintah dengan perhutani mengenai kewenangan lahan yang ada dilokasi destinasi wisata. Pemerintah tidak bisa melakukan pemulihan secara maksimal dikarenakan lahan yang ada masih dalam wilayah dari kerja perum perhutani yang juga memiliki kewenangan atas pengelolaan destinasi wisata. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk kemajuan dari destinasi wisata, pengelolaan lahan yang juga harus mendapatkan ijin dari Perum Perhutani untuk dapat dijadikan lahan produktif guna memajukan destinasi wisata. Masing-masing pihak menyadari kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh para stakeholders akan menghambat jalannya pengembangan potensi yang ada di sekitar tempat wisata sehingga masing masing stakeholders memerlukan sinergitas untuk mengelolan destinasi wisata. Sejalan dengan pendapat (Imron Muhammad, 2020) “Kerjasama collaborative mulai dipupuk oleh berbagai pihak menimbulkan kesadaran akan saling membutuhkan dan saling terbuka dalam merefleksikan aspirasinya menjadi modal awal kerjasama collaborative dilakukan”. Penilaian pada proses collaborative governance ini dapat dilihat dengan masing-masing stakeholders memahami atas potensi yang dimiliki oleh wisata tersebut. Untuk dapat mengembangkan untuk pemulihan lebih baik lagi memerlukan kemampuan jaringan maupun sumber finansial yang baik, kesadaran masing-masing stakeholders akan kekurangan masing-masing untuk mengelola destinasi wisata akan menghambat kemajuan destinasi wisata, sehingga memerlukan sinergitas antara pemerintah dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten untuk bisa mengembangkan untuk pemulihan destinasi wisata lebih baik lagi.

Innitiation (Inisiasi)

Innitiation (inisiasi) pada collaborative ini dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk menggandeng Perum Perhutani dalam mengelola dan pemulihan destinasi wisata dapat dirasa sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pihak. Pemerintah Kota melakukan komunikasi dengan Perum Perhutani guna keberlangsungan pengelolaan destinasi

wisata dengan melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten sebagai pengelola langsung atas destinasi wisata tersebut. Pihak perum perhutani dan Pemerintah Kabupaten sangat merespon dengan baik dengan adanya inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota guna pengelolaan destinasi wisata tersebut. Dalam pengelolaan pariwisata yang mana dalam pemulihan memerlukan sinergitas antar pemangku kepentingan yang memiliki peran tersendiri dalam pariwisata, tahapan inisiasi ini menentukan bahwa ketiga aktor tersebut yang telah memenuhi kebutuhan dalam collaborative governance, pihak perum perhutani selaku pemilik lahan yang nantinya akan menjadi fasilitator dalam pengadaan maupun penambahan lahan baru di lokasi wisata, dan Pemerintah Kabupaten selaku pengelola langsung yang akan memmanagement seluruh pengelolaan yang terjadi mulai dari pelayanan hingga keamanan di lokasi destinasi wisata. Menurut Ansell and Gash (2007) mengatakan bahwa "suatu kerjasama dapat dikatakan collaborative governance ketika suatu kerjasama itu di inisiasi oleh lembaga public". Pemerintah merupakan lembaga publik yang menjadi inisiator dalam kerjasama ini dengan demikian dapat dikatakan sebagai collaborative governance.

Delebration (Musyawarah)

Delebration atau musyawarah yang dilakukan oleh para Stakeholders membahas mengenai aturan dasar yang nantinya di sepakai dalam bentuk perjanjian kerjasama oleh ketiga pihak antara Pemerintah Kota dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten untuk pengelolaan destinasi wisata. Musyawarah yang dilakukan terlihat berjalan dengan baik yang dilakukan secara formal dan non formal oleh ketiga belah pihak, dengan menggunakan dialog langsung atau tatap muka maupun tak langsung dengan menggunakan via phone guna melancarkan proses musyawarah yang dilakukan.

Tahapan musyawarah yang dilakukan melibatkan perangkat daerah yang lain untuk membantu dalam keberhasilan proses kerjasama pemulihan pariwisata. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilibatkan seperti Bagian Hukum, BPKD, Dinas Pemdes, Dinas PU, BAPPEDA, Perhutani dan Pemerintah Kabupaten itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bertujuan untuk membantu prosesi keberlangsungan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Perum Perhutani, dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pemulihan destinasi wisata. Proses musyawarah yang dilakukan ini terlihat adanya negoisasi yang dilakukan oleh para stakeholders untuk menentukan beberapa point yang ada di dalam perjanjian kerjasama (PKS). Negoisasi tersebut berlangsung pada saat pembahasan mengenai pembagian hasil redistribusi dan kewajiban mencetak karcis masuk pada lokasi desinasi wisata. Adanya negoisasi didalamnya menemukan sebuah keputusan untuk pembagian hasil redistribusi Pemerintah Kota 25%, Perum Perhutani 25% dan Pemerintah Kabupaten 50% dan percetakan karcis masuk dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Musyawarah yang dilakukan oleh ketiga pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Kota, Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten merumuskan antara lain menentukan fokus dari masing masing aktor, Pemerintah Kota memiliki fokus sebagai fasilitator dan promosi yang dilihat kapasitas dari pemerintah Kabupaten lebih memiliki konektifitas yang cukup tinggi akan lebih mudah untuk mengembangkannya. Perum Perhutani akan lebih fokus kepada fasilitas lahan yang berpotensi untuk pengembangan di destinasi wisata serta keproduktifan lahan. Pengelolaan akan difokuskan kepada Pemerintah Kabupaten dimana pada pemerintah Kabupaten yang akan bersentuhan langsung dengan lokasi destinasi wisata sehingga untuk penanganannya lebih optimal yang nanti akan dikoordinasikan kepada pemerintah Kota maupun perhutani.

Implementation (Penerapan)

Implementation yang telah dilakukan terjadi sebuah penandatanganan perjanjian kerjasama oleh para Stakeholders menunjukkan pemahaman yang dapat disepakati bersama untuk melakukan sinergitas dalam pengembangan destinasi untuk pemulihan destinasi wisata tersebut. Masing-masing pihak berusaha menjalankan program sesuai

dengan tupoksinya yang telah dibuat. Pemerintah yang membangun sarana dan prasarana sesuai kapasitas yang dimiliki serta promosi yang telah menghasilkan wisata dapat mengikuti beberapa event promosi. Akses jalan yang sudah dibangun, diadakannya pelatihan serta pendampingan terhadap sumber daya manusia pada pengelola destinasi wisata yang memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pengunjung memberikan kepuasan serta kepercayaan tersendiri bagi wisatawan.

Implementation ini menunjukkan ketiga aktor melakukan perannya dengan baik, pemerintah Kota sebagai fasilitator dan juga mediator melakukan pembangunan fasilitas seperti jalan penerangan dan juga pengembangan terhadap SDM pengelola yang sangat menunjang keberhasilan pengelolaan destinasi wisata. Perum Perhutani juga sebagai fasilitator juga melakukan perluasan lahan guna memenuhi kebutuhan fasilitas wisata seperti pengembangan lahan parkir yang dibutuhkan untuk menampung kendaraan para pengunjung. Pemerintah Kabupaten selaku pengelola dapat dengan baik menjalankan tugasnya sebagai pengelola dengan koordinasi dan bantuan dari pokdarwis sebagai SDM pengelolanya terdapat penambahan jasa usaha wisata baru yang berada di lokasi destinasi wisata menunjukkan tanggung jawab atas kolaborasi yang telah terjalin antara ketiga belah pihak.

Penerapan evaluasi yang dilakukan pada setiap tahunnya menjadi bahan untuk perpanjangan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para Pemerintah Kota dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten. Perubahan atau pemulihan yang terjadi di lokasi wisata menunjukkan bahwa dari ketiga aktor tersebut telah menjalankan peran masing-masing dengan baik, sehingga kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan Perhutani dan Pemerintah Kabupaten dapat diperpanjang dengan baik. Penerapan konsep *collaborative governance* pada pemulihan sektor UMKM menggunakan delapan variabel pengukur keberhasilan *collaborative governance* yang dikemukakan oleh DeSeve:

Network Structure

Merupakan bentuk struktur jaringan model *selfgovernance*, dimana model dicirikan dengan tidak adanya entitas administratif, namun masing-masing stakeholders berpartisipasi dalam jaringan dan kegiatan dilakukan oleh semua stakeholders yang terlibat.

Commitment to a Common Purpose

Variabel ini mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada pada kolaborasi multistakeholders dalam mempromosikan produk UMKM, tujuan ini bersifat positif karena asumsinya dengan semakin banyak produk UMKM, maka akan semakin menunjang perekonomian daerah khususnya Pemerintah Kota.

Trust Among Participants

Eksistensi kepercayaan diantara kelompok yang terlibat terlihat sebagai salah satu faktor sukses yang penting. Pada kolaborasi yang dilakukan multistakeholders dalam mempromosikan produk UMKM yaitu sebagai pemulihan terlihat bahwa adanya rasa saling percaya diantara stakeholders. Hal ini dibuktikan dengan meskipun tidak adanya dokumen resmi yang mengikat kolaborasi, namun mereka tetap berpartisipasi dalam melakukan kegiatan promosi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan antar stakeholders bersifat positif.

Governance Variabel ini merujuk kepada tiga syarat, diantaranya: a. Ada batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat; b. Aturan main yang jelas yang disepakati bersama; c. Kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dilakukan.

Access to Authority

Variabel ini merujuk kepada apakah ada standar/ukuran ketentuan prosedur yang dijelaskan diterima secara luas. UPTD Promosi Produk UMKM memiliki ketentuan prosedur

yang jelas dalam melakukan kegiatan promosi produk yang jelas. Selanjutnya kegiatan promosi ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Asumsinya OPD yang terlibat dalam kegiatan promosi produk UMKM ini memiliki standar ketentuan prosedur yang jelas, namun pada stakeholders lain yang merupakan pihak swasta dan masyarakat, standar ketentuan prosedur yang jelas ini tidak dapat ditemukan.

Distributive Accountability/ Responsibility

Tidak adanya kejelasan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh multistakeholders dalam melakukan pemulihan produk UMKM ini berimplikasi pada tidak adanya pembagian akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas. Seharusnya penatakelolaan dan pembuatan keputusan harus dibagi kepada para pelaku yang ada dalam sebuah jaringan. Asumsinya jika para anggota tidak terlibat dalam perumusan tujuan jaringan, maka jaringan tersebut akan gagal mencapai tujuannya. Namun fenomena yang ditemui pada kolaborasi multistakeholders dalam mempromosikan produk UMKM ini adalah para anggota yang terlibat dalam jaringan kolaborasi ini tidak secara bersama merumuskan tujuan kolaborasi, stakeholders yang berpartisipasi merumuskan sendiri tujuannya masing-masing dan memanfaatkan sumberdaya dan otoritas yang mereka miliki masing-masing.

Information Sharing

Penyampaian informasi antar stakeholders yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi pemulihan produk UMKM ini dapat dikatakan cukup baik. Dimana seluruh stakeholders yang terlibat didalam jaringan kolaborasi memiliki kemudahan akses informasi, namun untuk perlindungan privacy dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota jaringan tidak dapat ditemukan. Masing-masing stakeholders melakukan perlindungan privacy mereka masing-masing, sedangkan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota jaringan tidak ada karena semua pihak baik yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi produk UMKM, tetap mendapatkan akses untuk memperoleh informasi seputar kegiatan ini.

Access to Resources Variabel

Membahas ketersediaan sumberdaya keuangan, teknik, manusia, dan sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan jaringan. Secara umum seluruh sumberdaya yang dibutuhkan dalam mempromosikan pemulihan produk UMKM tersedia dengan cukup. Mulai dari sumberdaya keuangan yang dianggarkan dalam APBD maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Sumberdaya teknik disini peneliti maknai sebagai strategi yang digunakan multistakeholders dalam mempromosikan produk UMKM dan sumberdaya manusia disini peneliti asumsikan sebagai multistakeholders yang terlibat dalam kegiatan promosi produk UMKM.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada proses collaborative governance dalam pemulihan pemerintah sektor pariwisata dan UMKM, Pemerintah Kota melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga dengan Perum Perhutani KPH dan Pemerintah Kabupaten menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam proses collaborative governance melibatkan para stakeholders yang terlibat untuk membantu dalam menyukseskan kolaborasi tersebut yang dilihat dari empat indikator menurut More and Stephens (2012) didalamnya. Adanya negosiasi yang dilakukan oleh para Stakeholders merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebuah langkah untuk menyamakan pemahaman antar Stakeholders dalam kolaborasi tersebut.

Berdasarkan pembahasan tentang hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, masih ditemukan permasalahan terkait penerapan collaborative governance pada promosi produk UMKM. Untuk memperbaiki hal tersebut, peneliti menyampaikan rekomendasi yaitu dibentuknya suatu dokumen kesepakatan resmi berupa MoU untuk menjelaskan bentuk kolaborasi yang dilakukan multistakeholders dalam mempromosikan produk UMKM ini, sehingga akan menjelaskan batasan-batasan perilaku tentang apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, apa yang dikatakan melanggar dan apa yang dikatakan masih dalam ambang batas kewajaran, siapa pihak yang terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, bagaimana aturan mainnya, sehingga kemudian ini akan berimplikasi kepada pembagian akuntabilitas dan tanggung jawab yang merata bagi multistakeholders yang berpartisipasi.

Ucapan Terimakasih

Saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. dan juga shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhamad Husein Maruapey M.Sc. selaku dosen pembimbing. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan, dan semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi pembacanya.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, Wiwiek Rabiatul. (2013). Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. *Journal & Proceeding*. (Online), Jurnal Vol 1, No. 1 (<http://jp.feb.unsoed.ac.id/>), diakses pada 10 September 2018 pukul 14.00 WIB.
- Ansell, Chris and Alison Gash (2008), 'Collaborative governance in theory and practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), 543-571.
- Ansell, Chris dan Gash, Alison. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *JPART*. (Online), Volume 18 (<https://sites.duke.edu/>) diakses pada 20 Agustus 2018.
- Ansell. & Gash. Collaborative Governance in Theory and Practice. University of California, Berkeley
- Davies, Althea L. and Rehema M. White (2012), 'Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland', *Journal of Environmental Management*, 112, 160-169.
- Dewi, Ratna Trisuma. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil. Tesis. Surakarta: Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret.
- Elvirandini, Verinnathasia dan M.Farid Ma'ruf. (2018): Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perum Perhutani Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Pada Program Paha Sylpi di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Imron Muhammad, (2020), Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan, *Journal of public sector innovation*, vol. 4, no. 2.
- Jihansson (2010) dalam Kurniasaih, Denok, dkk. (2017). Collaborative governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat kabupaten banyumas. *Jurnal Adimistrasi publik*. Vol. 19

Kurniasih Denok, (2017), Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah Pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banyumas), JPSI (Journal of Public Sector Innovations), Vol. 1, No. 2,

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Promosi Produk UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Payakumbuh.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Syafril, Yogi. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Skripsi. Padang: Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas.

Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.